

HUBUNGAN UPAH MINIMUM PROVINSI DENGAN JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL DI JAWA TIMUR

Devi Lestyasari
Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya

ABSTRACT

This study aims to find out how the connection of province minimum wage with the number of formal labour. This study is a kind of descriptive associative study with the quantitative approach. This research is done in province East Java with sample sample province minimum wage with the number of formal labour in the years 2007-2011. The data analysis technique in this study using product moment correlation with t-test. The result of the study showed that the variable of province minimum wage has a very strong positive connection with the number of formal labour in East Java. While the result of t-test show that $t_{xy} > t_{tabel}$, it means that the research hypothesis is accepted, it means that increased province minimum wage so that increased the number of formal labour too.

Keywords: minimum wage, province minimum wage, formal labour.

Pengaturan pengupahan utamanya harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja agar dapat terpenuhi karena dari waktu ke waktu senantiasa meningkat, serta memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu, penetapan upah minimum dan kenaikan upah minimum perlu dilakukan dan dikaji secara cermat sehingga semua pihak dapat menarik manfaatnya. Kenaikan Upah Minimum yang terlalu drastis akan merugikan perusahaan. Sebaliknya kenaikan yang terlalu datar tidak menguntungkan pekerja/buruh, karena kenaikan tersebut akan kalah oleh inflasi sehingga tujuan menaikkan kesejahteraan pekerja/buruh tidak akan tercapai. Oleh karena itu kenaikan Upah Minimum perlu

diketahui dan disetujui oleh semua pihak..

Upah Minimum Provinsi Jawa Timur antara tahun 2010 sampai 2011 mengalami kenaikan sebesar 12 %. Dampak dari kenaikan upah minimum provinsi ini paling dirasakan oleh pengusaha karena akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan laba perusahaan. Dengan adanya kenaikan upah minimum ini pengusaha akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu berhenti berproduksi atau tetap berproduksi. Apabila produsen memilih untuk tetap berproduksi maka produsen akan menaikkan harga barang atau menekan biaya produksi yang salah satunya adalah mengurangi tenaga kerja.

Suatu Kemajuan perekonomian

sebuah negara dapat dilihat dengan tingginya pekerja di sektor formal dibandingkan pekerja di sektor informal. Walaupun sektor informal sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja namun nilai tambah yang diberikan oleh sektor informal tidak sebesar nilai tambah yang diberikan oleh sektor formal. Ini dikarenakan sektor formal terdiri dari tenaga kerja yang professional, dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Di Jawa Timur dari tahun 2010-2011 jumlah tenaga kerja di sektor formal mengalami kenaikan. Sedangkan pada tenaga kerja di sektor informal mengalami penurunan. Maka dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja formal.

Hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Sumarsono (2009:201) penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal. Kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih rendah, maka dampak

distribusi pendapatan akan justru memburuk. Keadaan ini akan lebih buruk jika kenaikan upah mendorong kenaikan tingkat inflasi.

Hasil penelitian Asep Suryahadi,dkk (2002) menunjukkan bahwa upah minimum di Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Penerapan upah minimum telah menguntungkan sebagian tenaga kerja tetapi merugikan sebagian lainnya, yaitu tenaga kerja yang rentan terhadap perubahan kondisi pasar tenaga kerja, seperti pekerja perempuan, usia muda dan yang berpendidikan rendah. Upah minimum yang tinggi diatas standar yang berlaku di pasar berdampak pada pengurangan tenaga kerja di sektor formal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan di bahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur? (2) Bagaimana perkembangan tenaga kerja di Jawa Timur? (3) Apakah terdapat hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur dengan jumlah tenaga kerja formal di Jawa Timur?

Tenaga Kerja

Menurut Sumarsono (2009:3) tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*). Sedangkan menurut Subri (2003:59) tenaga kerja atau *Man power* adalah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan telah menetapkan batas usia kerja menjadi 15 tahun atau lebih.

Struktur Ketenagakerjaan

Menurut Subri (2003: 71-72) struktur perekonomian suatu negara dapat dicerminkan dengan: (1) Struktur lapangan pekerjaan utama dari para pekerjanya. (2) Struktur jenis pekerjaan utama dari para pekerjanya. (3) Struktur status pekerjaan utama dari para pekerjanya.

Sektor Formal Dan Sektor Informal

Menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia

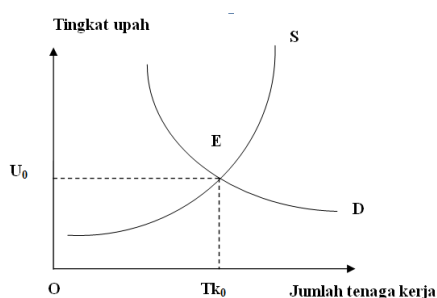
(2001) (dalam menegpp, 2003:2) menggunakan status pekerjaan utama untuk pengelompokan sektor formal dan sektor informal adalah sebagai berikut: (1) Sektor formal : (a) Mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan, (b) Berusaha dengan dibantu buruh tetap. (2) Sektor informal: (a) Mereka yang berusaha sendiri, (b) Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, (c) Pekerja bebas di pertanian, (d) Pekerja bebas di non pertanian, (e) Buruh tidak dibayar.

Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja

Kurva permintaan untuk tenaga kerja sebagai suatu masukan suatu faktor mempunyai kemiringan yang bergerak dari kiri ke kanan bawah yang digambarkan oleh garis *demand* (D). Ini menunjukkan jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang pengusaha bersedia untuk mempekerjakannya pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Kurva penawaran untuk tenaga kerja mempunyai kemiringan yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang digambarkan oleh garis *supply* (S). Garis *supply* menggambarkan jumlah maksimum (orang yang menawarkan jasanya) yang siap disediakan pada kemungkinan

tingkat upah untuk periode waktu (Arfida, 2003:64).

Berdasarkan pada gambar kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu, jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar Tk_0 pada tingkat upah keseimbangan U_0 . Titik keseimbangan (*equilibrium*) adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbangan U_0 maka semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada orang yang menganggur. Keadaan seperti ini disebut *full employment* pada tingkat upah U_0 tersebut.



Sumber: Arfida (2003:210)

Gambar: Kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu.

Titik kesimbangan E ini akan bergeser dan tidak seimbang lagi apabila terjadi gangguan-gangguan di pasar kerja, terutama bila terjadi pergeseran-

pergeseran kurva permintaan atau penawaran tenaga kerja. Biasanya kekuatan mekanisme pasar akan membentuk dengan sendirinya equilibrium yang baru.

Upah

Menurut Undang-Undang tenaga kerja nomor 13 tahun 2003 bab 1, pasal 1, ayat 30, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Teori Upah Besi

Teori upah subsistensi (hukum besi) oleh David Ricardo (1772-1823) yaitu upah ditentukan oleh interaksi penyediaan dan permintaan akan buruh. Lebih lanjut berasumsi bahwa bila pendapatan penduduk bertambah di atas tingkat subsisten, maka penduduk akan bertambah lebih cepat dari laju pertambahan makanan dan kebutuhan

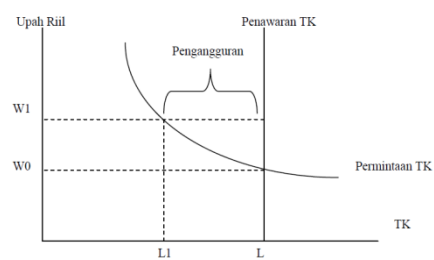
lain. Angkatan kerja bertambah maka akan bertambah pula angkatan kerja yang memasuki pasar kerja dan mencari kerja. Penawaran tenaga kerja menjadi lebih besar dari permintaan.

Teori upah besi adalah upah riil dalam jangka panjang cenderung terhadap upah minimum yang diperlukan untuk menyokong kehidupan pekerja. Upah tidak dapat jatuh di bawah tingkat subsistensi karena tanpa subsisten, buruh tidak akan mampu bekerja. Teori *iron wage* ini cenderung merugikan kepentingan pengusaha dan pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Kenaikan upah akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga para penganggur akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan para pengusaha akan disulitkan dengan kenaikan biaya produksi. Kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya merupakan indikasi adanya kekakuan upah (*wage rigidity*).

Upah tidak selalu bisa fleksibel, ketika diterapkan kebijakan mengenai upah minimum (sebesar W_1) di atas tingkat keseimbangannya maka yang terjadi adalah kekakuan upah. Upah tidak akan bergerak menuju ke titik

keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum itu sendiri. Upah tidak akan turun (rigid) ke W_0 akibat adanya kebijakan upah minimum sebesar W_1 .

Karena itu, sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerjanya menjadi L_1 sehingga timbul pengangguran sebesar L dikurangi L_1 .



Sumber: Mankiw (2009: 157)

Gambar : Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Upah Minimum

Pengertian upah minimum dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 1999, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. upah minimum provinsi adalah upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur. Kebijakan upah minimum di dalam Undang Undang No 13 tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara lain:

- 1) Pemerintah menetapkan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Upah Minimum dapat diterapkan:
(a) berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; (b) berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.
- 3) Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- 4) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Penangguhan

pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

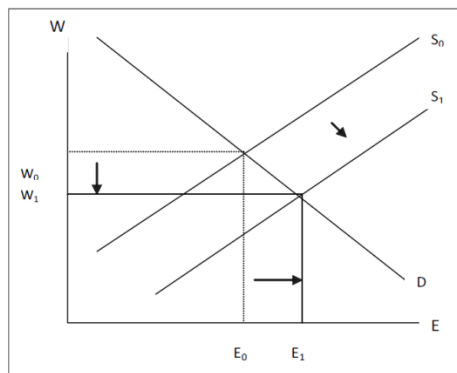
Hubungan Upah Minimum Dengan Tenaga Kerja

Menurut *efficiency wage theory* dalam Sumarsono (2009:201), bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya.

Hubungan upah minimum dengan tenaga kerja dapat dilihat pada Model dual sektor, dimana dikembangkan oleh Welch (1974) adalah perluasan dari model kompetitif. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat dua sektor di dalam ekonomi (segmentasi ekonomi) yaitu sektor formal (yang terdorong oleh kebijakan upah minimum) dan sektor informal (sektor yang tidak terdorong oleh kebijakan upah minimum) dengan mobilitas yang sempurna antar dua sektor tersebut.

Seandainya kemudian ada kebijakan upah minimum pada sektor formal yang lebih tinggi dibandingkan

tingkat keseimbangan upah W_0 . Hal ini akan menyebabkan sektor formal menjadi lebih dipilih oleh pekerja dibandingkan sektor informal. Dengan kata lain kebijakan upah minimum ini menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labour*) pada sektor formal. Berdasarkan model dual sektor ini kelebihan penawaran pada sektor formal akan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal. Kondisi ini digambarkan oleh pergeseran dari kurva penawaran dari sektor informal dari S_0 ke S_1 pada gambar dibawah ini:



Sumber:Pratomo dan Saputra(2011:273)

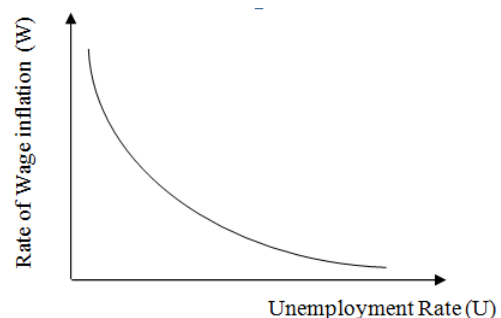
Gambar : upah minimum di sektor informal

Kurva Philip

Philip menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan perubahan tingkat upah. Kurva Philips membuktikan

bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran rendah, sebagai konsikueensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.

Maka, kurva ini menunjukkan adanya track-off (hubungan negatif) antara inflasi dan pengangguran, yaitu tingkat pengangguran akan selalu dapat diturunkan dengan mendorong kenaikan laju inflasi, dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran.



Sumber: Sumarsono (2009:261)

Gambar: Kurva Philip

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Asep Suryahadi,dkk (2002) berjudul Upah dan Kesempatan Kerja: Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal Perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum di Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Penerapan upah minimum telah menguntungkan sebagian tenaga kerja tetapi merugikan sebagian lainnya, yaitu tenaga kerja yang rentan terhadap perubahan kondisi pasar tenaga kerja, seperti pekerja perempuan, usia muda dan yang berpendidikan rendah. Upah minimum yang tinggi diatas standar yang berlaku di pasar berdampak pada pengurangan tenaga kerja di sektor formal.

Penelitian kedua dilakukan oleh Vivi Alat dan Lisa A.Cameron (2008) yang berjudul "*The Impact of Minimum Wage on Employment in a Low-Income Country: A Quasi-Natural Experiment in Indonesia*" membahas tentang upah minimum dan tenaga kerja di Negara berpenghasilan rendah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada dampak negatif bagi pekerja di perusahaan besar, baik asing maupun domestik, tetapi bagi pekerja di perusahaan kecil, pekerja perusahaan dalam negeri akan menderita kerugian sebagai akibat dari kenaikan upah minimum.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Gindling dan Terrell (2004) yang berjudul "*Legal Minimum Wages and the Wage of Formal and Informal Sector Workers in Costa Rica*" Kebijakan upah minimum ditekankan untuk seluruh pekerja yang dilindungi undang-undang. Perubahan kebijakan upah minimum berpengaruh lebih besar terhadap upah rata-rata untuk tenaga kerja di pedesaan daripada di daerah perkotaan. Kebijakan upah minimum di Costa Rica berperan untuk meminimalisir jarak upah antara sektor informal dan sektor formal di perkotaan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Maimun Sholeh (2005) yang berjudul Dampak Kenaikan Upah Minimum Propinsi terhadap Kesempatan Tenaga Kerja (Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan upah secara positif akan berdampak pada kesempatan kerja.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dan asosiatif atau hubungan dengan pendekatan kuantitatif. Rancangan penelitian ini adalah hubungan Upah Minimum Provinsi

(UMP) (X1) sebagai variabel bebas dengan jumlah tenaga kerja formal di Jawa Timur (Y). Populasi dari penelitian ini adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) seluruh Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2007-2011 dan jumlah tenaga kerja formal di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) Metode dokumentasi dan Studi kepustakaan.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan asosiatif atau hubungan serta analisis korelasi *product moment*. Analisis korelasi *product momen* adalah suatu metoda statistika yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel atau lebih (Variabel bebas dan variabel terikat). Berikut ini terdapat beberapa rumus yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a) Untuk menguji apakah ada hubungan antara Upah Minimum Provinsi dengan jumlah tenaga kerja formal digunakan analisis korelasi *product moment* dengan uji-t.

Berikut ini adalah rumus perhitungan analisis korelasi:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2) (\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

- r_{xy} : Koefisien korelasi antara Upah Minimum Provinsi dengan jumlah tenaga kerja
- n : Banyaknya tahun yang diteliti
- $\sum X$: Jumlah variabel X (Upah Minimum Provinsi)
- $\sum Y$: Jumlah variabel Y (Jumlah Tenaga Kerja Formal)
- $\sum X^2$: Jumlah dari variabel X yang dikuadratkan
- $\sum Y^2$: Jumlah dari variabel Y yang dikuadratkan
- $(\sum X)^2$: Kuadrat dari jumlah variabel X
- $(\sum Y)^2$: Kuadrat dari jumlah variabel Y
- $(\sum XY)$: Jumlah perkalian dari variabel X dan variabel Y

Tabel : Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2006:216)

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang telah ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat

berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel diatas.

- b) Sedangkan uji-t dalam penelitian ini digunakan untuk pengujian signifikansi hubungan variabel independent yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap variabel dependent yaitu jumlah tenaga kerja formal. Rumus uji-t dapat disusun sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Ho : $\rho = 0$, maka tidak ada hubungan antara Upah Minimum Provinsi dengan jumlah tenaga kerja formal di Jawa Timur.

Ha : $\rho \neq 0$, maka ada hubungan antara Upah Minimum Provinsi dengan jumlah tenaga kerja formal di Jawa Timur.

Kriteria penolakan Ho:

$$Ho : |t_{hitung}| \geq t_{\frac{\alpha}{2}, df}$$

Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{table} maka, Ho ditolak atau dapat disimpulkan hubungan antara variabel dependent dan variabel independen signifikan.

Hasil Penelitian

Upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur.

Tabel: Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur per tahun, 2007-2011

Tahun	UMP Jatim (Rp)	Pertumbuhan (%)
2006	390.000	-
2007	448.500	13,04
2008	500.000	11,50
2009	570.000	14
2010	630.000	10,53
2011	705.000	12

Perkembangan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) dari tahun 2007 sampai tahun 2011 selalu mengalami kenaikan yang terus menerus dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 14 persen. Upah Minimum Provinsi (UMP) paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 705.000,- meningkat sebesar 12 persen dari upah

tahun 2010 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 448.500,-. Kebijakan upah ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa penetapan Upah Minimum dapat dipastikan akan lebih besar atau setidaknya sama dengan upah minimum tahun sebelumnya.

Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur terus mengalami peningkatan namun Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan selama ini masih dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Jawa Timur. Berikut data besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : Perbandingan UMP dan KHL
Jawa Timur Tahun 2007-2011

Tahun	UMP (Rp)	KHL (Rp)	% UMP terhadap KHL
2007	448.500	458.755	97,76
2008	500.000	544.157	91,89
2009	570.000	706.698	80,68
2010	630.000	856.888	73,52
2011	705.000	731.635	96,36

Sumber: Ditjen PHI Jamsostek, Diolah Pusdatinaker, 2011

Pencapaian tertinggi Upah Minimum Provinsi (UMP) terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 97,76 persen, dan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 73,52 persen. Semakin tinggi pencapaian Upah Minimum Provinsi (UMP) dibandingkan dengan KHL maka akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Jawa Timur.

Tenaga kerja adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut dimana ada unsur upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di Jawa Timur pada periode tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi,

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Jawa Timur pada tahun 2007-2009 jumlah tenaga kerja yang bekerja terus mengalami kenaikan, pada tahun 2007 berjumlah 18.751.421 orang, tahun 2008 berjumlah 18.882.277 orang dengan kenaikan sebesar 0,70 persen dari tahun 2007, dan pada tahun 2009 berjumlah 19.305.056 orang dengan kenaikan sebesar 2,24 persen dari tahun 2008 . Namun pada tahun

2010 jumlah tenaga kerja yang bekerja mengalami penurunan sebesar 606.948 orang tenaga kerja atau turun 3,14 persen menjadi 18.698.108 orang. Pada tahun 2011 kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur membaik, jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan menjadi 18.940.340 orang atau naik sebesar 1,30 persen.

Menurut Indracahyo Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (dalam tempo, 1 Desember 2010) penurunan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2010 terjadi di semua sektor, penurunan jumlah penduduk yang bekerja juga disebabkan penurunan angkatan kerja (tenaga kerja di atas 15 tahun). Pada awal tahun 2010, angkatan kerja di Jawa Timur mencapai 20,623 juta orang, dan pada akhir tahun turun menjadi 19,527 juta orang. Angkatan kerja berkurang karena terjadi perubahan struktur ketenagakerjaan. Contohnya, ibu-ibu yang dulu bekerja kini memilih menjadi ibu rumah tangga.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Jawa Timur terus mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 yaitu pada tahun 2007 sebesar 6,79 persen, tahun

2008 sebesar 6,42 persen, tahun 2009 sebesar 5,08 persen, tahun 2010 sebesar 4,25 persen dan 4,16 persen pada tahun 2011.

Tenaga kerja pada struktur ketenagakerjaan menurut status pekerjaan utamanya dibagi menjadi tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal. Pada tenaga kerja di sektor formal di Jawa Timur selama tahun 2007-2011 perkembangannya mengalami fluktuasi, pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja formal sebesar 26,98 persen, pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja formal sebesar 27,1 persen naik sebesar 0,44 persen, pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja formal sebesar 26,88 persen turun sebesar 0,81 persen, penurunan ini karena terjadi krisis global pada tahun 2008 yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang berpindah ke sektor informal. Pada tahun 2010-2011 secara berturut-turut jumlah tenaga kerja di sektor formal mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010 sebesar 29,07 persen dengan kenaikan 8,15 persen serta pada tahun 2011 sejumlah 32,23 persen dengan kenaikan sebesar 10,87 persen.

Pembahasan

Berdasarkan hasil korelasi antara hubungan Upah Minimum Provinsi

(UMP) dengan jumlah tenaga kerja formal dibawah ini:

1. Hasil perhitungan korelasi *product moment* menggunakan bantuan program *eviews 7*.

	L	UMP
L	1.000000	0.906533
UMP	0.906533	1.000000

Diperoleh angka korelasi sebesar 0,906 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan jumlah tenaga kerja formal adalah sangat kuat.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t adalah sebagai berikut;

2. Hasil perhitungan Uji-t menunjukkan $t_{xy} = 3,71$,kemudian harga t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan harga t_{tabel} . Untuk kesalahan 5% dan $dk = n - 2 = 5 - 2 = 3$, maka diperoleh $t_{tabel} 2,353$. Uji $t_{hitung} > t_{tabel} = 3,71 > 2,353$ dengan koefisien 0,05 bahwa korelasi tersebut adalah signifikan. Koefisien determinasi $r^2 = 0,906^2 = 0,820$ yang berarti bahwa jumlah tenaga kerja formal 82 persen ditentukan oleh besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP), dan 18 persen ditentukan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam

penelitian ini. Dengan demikian dapat dijelaskan apabila Upah Minimum Provinsi (UMP) naik maka jumlah tenaga kerja formal di JawaTimur juga akan naik. Maka hipotesis dapat diterima karena secara statistik terbukti.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori upah besi yang menyatakan bahwa Teori upah besi adalah upah riil dalam jangka panjang, cenderung terhadap upah minimum yang diperlukan untuk menyokong kehidupan pekerja. Upah tidak dapat jatuh di bawah tingkat subsistensi karena tanpa subsisten, buruh tidak akan mampu bekerja. Teori *iron wage* ini cenderung merugikan kepentingan pengusaha dan pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Kenaikan upah akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga para penganggur akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan para pengusaha akan disulitkan dengan kenaikan biaya produksi. Kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya merupakan indikasi adanya kekakuan upah (*wage rigidity*). Upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja

di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum itu sendiri.

Penelitian ini tidak sejalan dengan model dual sektor, Model ini mengasumsikan bahwa terdapat dua sektor di dalam ekonomi (segmentasi ekonomi) yaitu sektor sektor formal (yang tercover oleh kebijakan upah minimum) dan sektor informal (sektor yang tidak tercover oleh kebijakan upah minimum) dengan mobilitas yang sempurna antar dua sektor tersebut. Kebijakan upah minimum ini menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labour*) pada sektor formal. Berdasarkan model dual sektor ini kelebihan penawaran pada sektor formal akan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal. Pendapat yang sama juga disampaikan Sumarsono (2002:201) menyatakan. Penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal. Kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa kerja di sektor informal lebih rendah, maka dampak distribusi pendapatannya akan justru memburuk.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur adalah yang paling rendah di Indonesia. Kenyataan ini juga salah satu penyebab kenapa jumlah tenaga kerja formal di Jawa Timur mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena para pengusaha atau perusahaan merasa tenaga kerja di Jawa Timur masih murah dibanding provinsi lain sehingga pengeluaran biaya produksi tidak setinggi perusahaan di provinsi lain. Sehingga perusahaan lebih memilih bertahan bahkan perusahaan dari daerah lain dimungkinkan berpindah ke Jawa timur karena Upah Minimum Provinsi (UMP) paling rendah diantara provinsi lain. Sesuai dengan pernyataan Presiden KSPI Iqbal (dalam detik finance, 20 Maret 2013) “Wajar kalau industri *labour* intensif/padat karya pindah ke daerah yang upah minimum rendah karena biaya hidup (KHL) di daerah tersebut seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga rendah”.

Pada penelitian ini pergeseran tenaga kerja juga dimungkinkan dari pasar informal menuju pasar formal, Hal ini terjadi bilamana di pasar formal tercipta kesempatan kerja kembali sehingga mengundang pekerja di pasar informal untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Hal tersebut menyebabkan

terjadinya pergeseran kurva penawaran tenaga kerja di pasar informal sehingga tingkat upah di pasar informal mengalami kenaikan. Pada kenyataannya seorang tenaga kerja dapat dengan mudah berpindah dari satu sektor ke sektor yang lain karena terciptanya kesempatan kerja dan tingkat upah yang lebih baik. Perpindahan tenaga kerja antar sektoral tersebut akan berhenti bila tingkat upah yang diharapkan (*expected wage*) antar sektor tersebut sama.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gindling dan Terrell (2004) bahwa kebijakan upah minimum di Costa Rica berperan untuk meminimalisir jarak upah antara sektor informal dan sektor formal di perkotaan.

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai bila tenaga kerja memperoleh uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak. Pada penelitian ini tenaga kerja di sektor formal memperoleh upah diatas UMP. Kenaikan upah minimum akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Hasil penelitian ini didukung oleh *efficiency wage theory* (Sumarsono, 2009:201), bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberikan nutrisi yang lebih baik kepada anak-anaknya. Keduanya dalam jangka panjang akan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

Ahli ekonomi A.W. Philips, Philip menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan perubahan tingkat upah. kurva ini menunjukkan adanya track-off (hubungan negatif) antara inflasi dan pengangguran, yaitu tingkat pengangguran akan selalu dapat diturunkan dengan mendorong kenaikan laju inflasi, dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran. Kurva Philips berguna untuk menganalisa gerakan jangka pendek pengangguran dan inflasi.

Pada kenyataan dalam penelitian ini ditemukan bahwa, jumlah tenaga

kerja di sektor formal di Jawa Timur mengalami peningkatan, pengangguran mengalami penurunan yaitu tahun 2007 sebesar 6,79 % , 2008 sebesar 6,42 % , 2009 sebesar 5,08 % , 2010 sebesar 4,25 % , 2011 sebesar 4,16 % dan inflasi rendah yaitu tahun 2007 sebesar 6,48 % , 2008 sebesar 9,23 % , 2009 sebesar 3,63 % , 2010 sebesar 6,96 % , serta tahun 2011 sebesar 4,09%.

Kenaikan harga bahan pokok merupakan salah satu pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Contohnya kenaikan harga beras biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok lainnya sehingga bakal mendongkrak angka inflasi. Inflasi terjadi disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah kenaikan upah dan faktor musim yang tidak menentu. Penetapan gaji atau upah dilaksanakan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan inflasi atau kondisi ekonomi terkini. Selain itu menurut Undang-Undang No. 13 tentang ketenagakerjaan bahwa upah minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan berdasar pada kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dsb. Komponen utama yang selalu berubah dan menyebabkan nilai UMP selalu naik

adalah makanan, minuman, dan transportasi. Inflasi menjadi penyebab ketiga faktor ini selalu berubah. Apabila tingkat inflasi tetap, nilai KHL tentu relatif stabil dari tahun ke tahun dan sebaliknya apabila inflasi tinggi maka nilai KHL akan naik.

Teori inflasi modern berpijak pada konsep NAIRU (*Nonaccelerating Inflation Rate of Unemployment*), yaitu tingkat pengangguran alamiah yang dapat dinikmati tanpa resiko inflasi. Hal ini mewakili tingkat pengangguran dari sumberdaya dimana pekerja dan produk pasar berada dalam keadaan keseimbangan inflasi. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Pengangguran di Jawa Timur terus mengalami penurunan namun sangat disayangkan karena besarnya kemampuan sektor informal menyerap tenaga kerja, bahkan menarik sebagian besar penganggur dibandingkan sektor formal.

Berdasarkan teori NAIRU, tidak ada pertukaran permanen antara pengangguran dan inflasi. Jadi inflasi dan pengangguran yang terus menerus merupakan masalah yang tidak saling terkait. Untuk melawan inflasi dalam jangka panjang pembuat kebijakan harus

mengurangi pertumbuhan uang yang beredar. Untuk melawan pengangguran, mereka harus mengubah struktur pasar tenaga kerja, karena pengangguran tidak dapat dihilangkan tetapi hanya bisa dikurangi. Pengangguran dapat dikurangi dengan cara perluasan kesempatan kerja dan menurunkan jumlah angkatan kerja.

Di Jawa Timur pengangguran tidak dapat dihilangkan karena jumlah penduduk yang berlebih sehingga besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan tenaga terdidik yang tidak seimbang. Dalam jangka panjang tidak ada tradeoff antara inflasi dan pengangguran atau kurva Philips jangka panjang adalah vertikal.

Kesimpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur pada tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan, kebijakan upah ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Namun Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan selama ini masih dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Jawa Timur.

2. Perkembangan Tenaga kerja di sektor formal pada tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Tenaga kerja di sektor formal pada umumnya mempunyai pendidikan dan keterampilan yang tinggi dengan produktivitas yang tinggi pula.
3. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan jumlah tenaga kerja formal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis penelitian diterima, artinya jika Upah Minimum Provinsi naik maka jumlah tenaga kerja formal di Jawa Timur juga akan naik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk menunjang produktivitas kerjanya, sehingga mampu bertahan apabila

- terjadi kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru.
2. Mengupaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan formal dan informal di pedesaan serta melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan keunggulan di wilayahnya masing-masing.
 3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) disesuaikan dan diupayakan berada di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
 4. Menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Daftar Pustaka

- Alatas, Vivi dan Cameron, Lisa A. 2008. *The Impact of Minimum Wages on Employment in a Low-Income Country: A Quasi-Natural Experiment in Indonesia* (online), (<http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=ilrreview>, diakses 7 April 2013).
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Keaadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2007*. BPS Provinsi Jawa Timur.
-, 2008. *Keaadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2008*. BPS Provinsi Jawa Timur.
-, 2009. *Keaadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2009*. BPS Provinsi Jawa Timur.
-, 2010. *Keaadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2010*. BPS Provinsi Jawa Timur.
-, 2011. *Keaadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2011*. BPS Provinsi Jawa Timur.
-, 2008. *Statistik Indonesia Tahun 2008*. BPS Indonesia.
-, 2011. *Statistik Indonesia Tahun 2011*. BPS Indonesia.
- Gindling, T.H dan Terrell, Katherine. 2004. *Legal minimum wages and the wages of formal and informal sector workers in Costa Rica*, (online), (<http://ftp.iza.org/dp1018.pdf>, diakses 14 Januari 2013).
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Khamis, Melanie. 2008. *Does the Minimum Wage Have a Higher Impact on the Informal than on the Formal Labor Market? Evidence from Quasi-Experiments* (online), (<http://ftp.iza.org/dp3911.pdf>, diakses 6 April 2013).
- Mankiw, N. Gregory. 2009. *Teori Makro Ekonomi. Terjemahan oleh Imam Nurmawan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- anak. 2003. Data dan Informasi Ketenagakerjaan, (online), (<http://www.menegpp.go.id/v2/index.php/datadaninformasi/ketenagakerjaan?download=41%3Apekerja-sektorformalinformal>), diakses 11 Januari 2013).
- Nurhidayat, Wiji. 2013. "Presiden Buruh Anggap Wajar 90 Perusahaan Henggang dari DKI". Detik Finance, (online), (<http://finance.detik.com/read/2013/03/20/173052/2199246/4/presiden-buruhanggap-wajar-90-perusahaan-henggang-dari-dki>), diakses 3 Juli 2013).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 *tentang Upah Minimum*.
- Prastomo, Devanto Shasa dan Saputra, Putu M.A. 2011. *Kebijakan Upah Minimum untuk Perekonomian yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945. Jurnal of Indonesian Applied Economics*, (online), Vol 5. No. 2:269-284. (<http://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/download/108/137>), diakses 12 Januari 2013).
- Pusat Data dan Informasi Tenaga Kerja. 2011. *Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur*, (online), (<http://pusdatinaker.balitfo.dep.nakertrans.go.id/katalog/xdownload.php?f=379>), diakses 15 Mei 2013).
- Sholeh, Maimun, 2005. *Dampak Kenaikan Upah Minimum Propinsi terhadap Kesempatan Tenaga Kerja (Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah)* (online), (<http://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/download/647/512>), diakses 6 April 2013).
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryahadi, dkk. 2002. Upah dan tenaga kerja: dampak kebijakan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor formal perkotaan. *Jurnal Analisis Sosial*, (online), Vol.7, No. 1 : 1-16. (http://akatiga.org/index.php/sumberreferensi/doc_download/34-jurnal-analisis-sosial-upah-minimum-dan-kesejahteraan-buruh-peluang-dan-tantangan-serikat-buruh), diakses 12 Januari 2013).
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tempo. 2010. Jumlah Penduduk Jawa Timur yang Bekerja Menurun, (online), (<http://www.tempo.co/read/new>

s/2010/12/01/180296020/Jumlah-Penduduk-Jawa-Timur-yang-Bekerja-Menurun, diakses 29 April 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 *tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*.

Wikipedia. 2013. Jawa Timur, (*online*), (id.M,Wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur, diakses 20 Mei 2013).

Worldbank. 2004. Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Pasar tenaga Kerja, (*online*), (worldbank_Minimum_Wage_INDONESIA_for_web.pdf, diakses 12 Januari 2013).